

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika politik internasional di tahun 1989 hingga 1991 membawa dampak yang besar kepada seluruh negara-negara di dunia. Peristiwa yang menandakan perubahan dinamika politik internasional ini adalah ketika berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Pasca runtuhnya USSR di tahun 1990 kemudian membawa pengaruh yang cukup besar pada India yang saat itu memiliki kedekatan hubungan bilateral dengan USSR baik secara politik, strategis, dan ekonomi. Besarnya dampak tersebut membuat India mengalami kondisi krisis dengan ketidakstabilan politik, peningkatan terorisme dan pemberontakan, serta krisis ekonomi dan krisis keuangan.¹ Di masa ini, ekonomi menjadi faktor utama dalam politik internasional berupa munculnya tren *free-market* atau pasar bebas yang mana status negara bergantung pada banyaknya jumlah kekayaan. Perdana Menteri India pada saat itu yaitu Narasimha Rao meminta Kementerian Luar Negeri India untuk fokus pada aspek ekonomi dalam hubungan eksternal negara.

Kebijakan politik luar negeri India *Look East Policy* (LEP) diluncurkan pada tahun 1991 oleh Perdana Menteri Narasimha Rao. Yang dimaksud dengan *look east* adalah *outward looking* India dalam mengumpulkan seluruh dukungan baik domestik maupun regional yang secara langsung memfokuskan dalam membangun sinergi dengan negara tetangga yang cepat, terkonsolidasi, dan

¹ Thongkholal Haokip, "India's Look East Policy: Its Evolution and Approach," *South Asian Survey* 18, no. 2 (2011): 239–257.

progresif menuju arah Timur di pusat benua Asia.² Terbentuknya LEP ini membuka tahapan liberalisasi ekonomi India yang semula pasif menjadi aktif dengan kerja sama dan masuknya investasi asing.³ India mengadopsi tiga pendekatan dalam upayanya menjalin kerja sama regional melalui LEP yaitu reformasi hubungan dengan negara-negara anggota Association of Southeast Asia Nations (ASEAN), meningkatkan interaksi ekonomi dengan kawasan Asia Tenggara (perdagangan, investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pariwisata), dan menjalin hubungan pertahanan dengan beberapa negara di kawasan.

Tujuan LEP yang ingin menjalin kembali hubungan dengan negara-negara tetangga melalui kerja sama ekonomi ini dirasa cukup berhasil karena dalam waktu singkat, India mampu menunjukkan eksistensinya menjadi mitra dialog dalam ASEAN Regional Forum (ARF) di tahun 1996.⁴ Selain itu, India juga aktif dalam memprakarsai organisasi sub-regional seperti Great Mekong Sub-region (GMS), Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation (BIMSTEC).⁵ Kebijakan ini kemudian terus dijalankan pemimpin-pemimpin India mulai dari Perdana Menteri Narasimha Rao (1991-1996), Atal Bihari Vajpayee (1998-2004), dan Manmohan Singh (2004-2014). Selama periode

² ASEAN, "Statement By His Excellency Mr. I. K. Gujral: Minister of External Affairs and Water Resources of India," ASEAN, terakhir diubah 1996, diakses 28 Februari 2023, www.aseansec.org/4756.

³ Haokip, "India's Look East Policy: Its Evolution and Approach," 240.

⁴ Muhammad Fathullah, "Dari Look East ke Act East: Arti Penting Perubahan Kebijakan Luar Negeri India terhadap Negara-Negara di Asia Tenggara," Universitas Airlangga, 2017, https://repository.unair.ac.id/69825/3/JURNAL_Fis.HI.27_18_Fat_d.pdf.

⁵ Haokip, "India's Look East Policy: Its Evolution and Approach," 253.

LEP ini, kerja sama yang telah dilakukan India membuktikan bahwasanya India mampu mencapai target-target LEP.

Lebih dari dua dekade berlangsung, LEP menjadi kebijakan politik luar negeri India yang mampu merevitalisasi hubungan bilateral dan multilateral India di politik internasional terutama di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan berjalannya waktu, politik internasional berdinamika yang semula berporos pada sistem bipolar menjadi sistem multipolar. Perkembangan ekonomi dan pertahanan negara kini juga jauh lebih beragam. Dengan perubahan ini, India kemudian memutuskan untuk memperbaharui kebijakan politik luar negerinya yang semula adalah *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* (AEP).

Perubahan kebijakan ini mulai menjadi *concern* India ketika Hillary Clinton, Sekretaris AS, pada tahun 2011 melalui pidato kunjungannya ke New Delhi yang mengungkapkan, “not just to look East, but to engage East and act East” untuk India.⁶ Namun, secara resmi perubahan AEP diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada ASEAN-India Summit tahun 2014 di Myanmar dengan menyatakan bahwa pemerintah India telah memperbaharui kebijakan luar negerinya dari LEP menjadi AEP dan Narendra Modi juga menambahkan bahwa dalam enam bulan awal masa pemerintahannya akan berprioritas pada transformasi kebijakan LEP menjadi AEP secara cepat.⁷ Perubahan diksi dari “Look” ke “Act”

⁶ US Department of State, “Remarks on India and the United States: A Vision for the 21st Century,” *US Department of State*, terakhir diubah 2011, diakses pada 10 Februari 2023, <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/07/168840.htm>.

⁷ Ministry of External Affairs Government of India, “Opening Statement by Prime Minister at the 12th India-ASEAN Summit, Nay Pyi Taw, Myanmar,” *Ministry of External Affairs Government of India*, terakhir diubah 2014, diakses pada 10 Januari 2023, <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24230/opening+stateme>.

merupakan penekanan bahwa India memberi sinyal baru untuk meningkatkan skala tindakan dan fokus cakupan.

Perbedaan utama dari LEP dan AEP adalah pada jangkauan wilayah serta jangkauan bidang kerja sama yang dilakukan. Sesuai dengan awal pendiriannya, LEP berfokus pada implementasinya hanya di kawasan Asia Tenggara saja dengan bidang kerja sama di bidang ekonomi. Sedangkan AEP memiliki fokus kerja sama di kawasan yang lebih luas lagi meliputi kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Bidang kerja sama yang dilakukan juga meliputi ekonomi sebagai *economic initiative* dan juga menjangkau bidang pertahanan keamanan, politik, strategis, dan kebudayaan termasuk pendirian institusional seperti *dialogue* dan kerja sama.⁸ Kebijakan AEP menjadi kebijakan yang berdasarkan pada 4C (*Culture, Commerce, Connectivity* dan *Capacity Building*).

Meskipun jangkauan AEP kini menjadi lebih luas, India menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara tetap menjadi prioritas dari implementasi AEP. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi saat kunjungannya ke Singapura di tahun 2015 yang menyatakan bahwa ASEAN sebagai “anchor of our Act East Policy.”⁹ Dari kedua kebijakan baik LEP dan AEP yang diterapkan pemerintah India, kesamaan dari kedua kebijakan ini adalah

⁸ Ministry of External Affairs Government of India, “Question No.4062 Act East Policy,” *Ministry of External Affairs Government of India*, terakhir diubah 2015, diakses pada 20 Februari 2023, <https://www.mea.gov.in/lok-sabha.htm?dtl/26237/question+no4062+act>.

⁹ Amitendu Palit, “India’s Act East Policy and Implications for Southeast Asia,” *Southeast Asian Affairs* (2016): 81–92, <http://www.jstor.com/stable/26466920>.

penekanan terhadap pentingnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti negara-negara yang tergabung dalam regionalisme ASEAN.¹⁰

Pendekatan India di kawasan Asia Tenggara dalam AEP dilandasi oleh tiga karakteristik yaitu (1) menghormati pentingnya ASEAN sebagai inti dari bagian dari regional ekonomi, (2) terlibat dalam CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam) sebagai negara anggota ASEAN yang diprioritaskan, (3) menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya melalui kerja sama bilateral.¹¹ India di bawah masa kepemimpinan Narendra Modi mendorong sebuah peran yang ambisius di Asia Tenggara melalui kerja sama bilateral dan multilateral.¹² India akan memberikan kekuatannya untuk menjaga kawasan dari rasa aman, nyaman, dan bebas dari segala eksploitasi. Dengan begitu, India berusaha agar implementasi AEP dapat membangun konektivitas informasi, memproyeksikan potensi berbagai kerangka kerja sama dan dapat mengundang negara-negara anggota ASEAN untuk bergabung dalam transformasi ekonomi dan keamanan India.¹³

Perubahan kebijakan yang dilakukan India tidak semata-mata mengubah fokus utama LEP dan AEP yaitu di kawasan Asia Tenggara. India dalam beberapa kurun waktu sebelumnya selalu menggunakan LEP sebagai kebijakan luar negerinya. Kemudian, India menetapkan kembali kawasan Asia Tenggara menjadi fokus utama kebijakan berikutnya dalam AEP. Oleh karena itu, perubahan

¹⁰ Luluk Fadilah dan Anggy Wira Pambudi, "Dampak Implementasi Kebijakan Look East dan Act East India terhadap Hubungan India dan ASEAN," *Jurnal Polinter* 6, no. 1 (2020): 46–59, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/4143>.

¹¹ Palit, "India's Act East Policy and Implications for Southeast Asia," 85.

¹² Danielle Rajendram, *India's New Asia-Pacific Strategy: Modi Acts East*, Lowy Institute for International Policy, 2014, <http://www.lowyinstitute.org/>.

¹³ K.V. Kesavan, "India's 'Act East' Policy and Regional Cooperation," *Observer Research Foundation (ORF)*, terakhir diubah 2020, diakses 27 Februari 2023, <https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-act-east-policy-and-regional-cooperation-61375/>

kebijakan ini menarik untuk dilihat karena apa kepentingan India di bawah pemerintahan Narendra Modi di kawasan Asia Tenggara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan pada kondisi kontestasi politik internasional. Perubahan ini mempengaruhi negara terutama pada bagaimana negara membentuk kebijakan politik luar negerinya. Salah satu negara tersebut adalah India. Pada tahun 1991, Perdana Menteri Narasimha Rao mengeluarkan kebijakan luar negeri India yang disebut dengan *Look East Policy*. Selama 20 tahun berjalan, kebijakan ini membawa India menjadi negara *emerging power* yang kemudian di tahun 2014, India melakukan perubahan pada kebijakan luar negerinya dan memperbarui *Look East Policy* menjadi *Act East Policy*. Perubahan dalam kebijakan ini adalah pada jangkauan wilayah dan jangkauan bidang kerja sama. Jika dalam *Look East Policy* hanya berfokus pada kawasan Asia Tenggara dan kerja sama di bidang ekonomi saja, maka dalam *Act East Policy* menjangkau kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Australia dengan kerja sama di bidang ekonomi dan keamanan. Terlepas dari perbedaan kedua kebijakan, India menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara tetap menjadi *anchor* atau fokus utama dari kebijakan ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah apa kepentingan India melalui *Act East Policy* di kawasan Asia Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepentingan India dalam *Act East Policy* sebagai kebijakan politik luar negerinya di kawasan Asia Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan studi Hubungan Internasional dalam kajian kebijakan luar negeri dan diharapkan dapat menambah pemahaman tentang kepentingan India dalam *Act East Policy* di kawasan Asia Tenggara.
2. Secara praktik dapat menambah pengetahuan terkait kajian kebijakan luar negeri dan sebagai *lesson learnt* bagi negara-negara *emerging power* dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negeri.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Thongkholal Haokip yang berjudul *India's Look East Policy: Its Evolution and Approach* pada tahun 2011.¹⁴ Dalam artikel jurnal ini, Haokip menjelaskan tentang bagaimana LEP muncul sebagai sebuah kebijakan luar negeri India pasca Perang Dingin dengan tujuan untuk membangun kontak politik, meningkatkan integrasi ekonomi, dan membentuk kerja sama keamanan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Diawali dengan menggambarkan kondisi domestik India di awal tahun 1990 yang merupakan masa sulit bagi India karena kondisi politik domestik yang tidak stabil

¹⁴ Haokip, "India's Look East Policy: Its Evolution and Approach,": 240.

mulai dari meningkatnya terorisme, gejolak politik, keputusasaan ekonomi dan krisis finansial.

Runtuhnya USSR juga menjadi kerugian terbesar India baik dari segi politik, strategis, dan ekonomi. India melihat bahwa setelah Perang Dingin berakhir memunculkan perubahan berupa pembangunan pada politik dan ekonomi dalam hubungan antar negara dan memulai era globalisasi. Dari sini, menurut India, regionalisme menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi. Para pemangku kebijakan India kemudian mengeluarkan yang disebut dengan *Look East Policy* (LEP) pada tahun 1991. LEP memiliki empat tujuan utama yaitu (1) integrasi ekonomi regional, (2) reformasi dan liberalisasi, (3) pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, (4) pembangunan wilayah Timur Laut. LEP ini menjadi sebuah strategi India dalam bidang ekonomi terkhususnya untuk ASEAN dan kawasan Asia Tenggara yang merupakan kawasan penting potensial untuk perdagangan India.

Perbedaan artikel jurnal ini dengan penulis adalah pada bentuk kebijakan yang dilakukan yang mana artikel jurnal ini membahas bagaimana evolusi dan pendekatan LEP di sistem internasional di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN dan juga di kawasan Asia Timur. Sedangkan penulis akan menganalisis kebijakan politik luar negeri India pasca LEP yaitu AEP yang dirilis pada tahun 2014 di kawasan Asia Tenggara. Dalam artikel jurnal ini berkontribusi membantu penulis untuk melihat kondisi awal India pasca Perang Dingin yang membawa India tertinggal dari negara-negara di sekitarnya hingga bangkit yang kemudian mampu menjalin kerja sama kawasan menjadi *emerging power*.

Studi pustaka kedua adalah buku yang ditulis oleh Amitav Acharya yang berjudul *India's 'Look East' Policy* di tahun 2015.¹⁵ Amitav Acharya adalah akademisi kelahiran India dengan kajian Hubungan Internasional yang berfokus pada regionalisme, keamanan di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, serta penerapan teori-teori HI non-barat. Dalam tulisan ini, Acharya menjelaskan tentang bagaimana LEP terbentuk melalui sejarah dan perkembangan politik India di dalam sistem internasional. Terbentuknya sebuah kebijakan politik luar negeri dipengaruhi pada dinamika politik internasional dimulai sejak berdirinya suatu negara hingga pada akhirnya kebijakan tersebut terbentuk. Hal ini diperjelas Acharya tentang kondisi India di periode awal pasca perang yang mana kepentingan India di kawasan Asia Tenggara terdiri dari nilai politis, strategis, dan dimensi ekonomi.

Evolusi pendekatan India ke kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara di awal abad 20 hingga lahirnya LEP di awal tahun 1990-an dibagi menjadi empat tahapan. Pertama adalah tahap 'romancing Asia' yang mana dalam tahap ini menceritakan kondisi awal India modern yang mulai membangun identitas negaranya dengan menekankan pada afinitas budaya dengan Asia yang menjadi komponen penting dalam gerakan nasionalnya. Di masa ini, permasalahan umum negara-negara adalah kondisi pasca merdeka dari imperialisme Barat. Dengan sejarah yang sama dan kesadaran akan kontribusi India dalam evolusi Asia di masa lalu kemudian memperdalam kesadaran India sebagai penggerak utama di kawasan. Tahapan kedua adalah 'leading Asia' yang menggambarkan India yang independen sebagai aktor internasional yang ternyata dibenci dan ditakuti di Asia dikarenakan

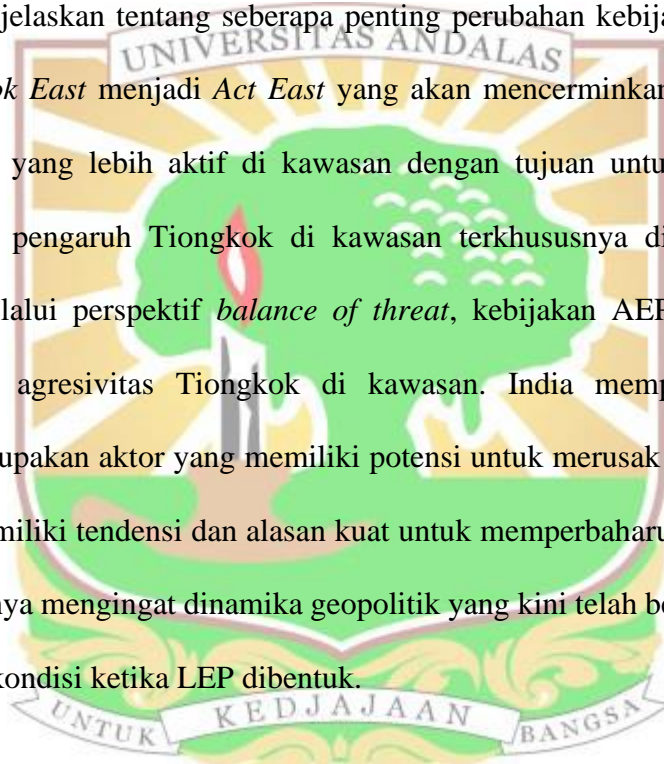
¹⁵ Amitav Acharya, *India's "Look East" Policy*, ed. David M. Malone, C. Raja Mohan, dan Srinath Raghavan (The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy, 2015).

gaya diplomasi dan sikap mendominasinya. Ketika India menghadapi *Sino-India War* di tahun 1962, ide India terhadap *Asian solidarity* dalam fase 'leading Asia' pun runtuh yang kemudian membawa India ke tahapan ketiga yaitu 'leaving Asia.' Di tahapan ini juga, India sedang memiliki kedekatan hubungan dengan USSR yang mana tentu saja tidak bertahan cukup lama. Setelah Perang Dingin dan runtuhnya rezim sosialis USSR, India kemudian berada di tahapan 'returning to Asia' menandakan kembalinya India ke kawasan Asia yang mana di tahapan ini juga kebijakan politik luar negeri India LEP hadir. Dari keempat tahapan ini, penulis mendapatkan gambaran pada bagaimana tahapan perkembangan politik yang dilalui India dari masa awal kemerdekaan India kemudian mengeluarkan LEP di sistem internasional.

Tulisan ini juga menjelaskan tentang bagaimana India memprioritaskan Asia Tenggara dalam implementasi LEP di kawasan dengan sasaran utama adalah pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini, Acharya kemudian menambahkan peran ASEAN yang merupakan organisasi regional Asia Tenggara dalam implementasi LEP. Hubungan ASEAN dan India semakin dekat karena keduanya tidak memiliki *territorial disputes*. Selain itu, meningkatnya kerja sama India dengan AS dalam bidang keamanan dan kekuatan angkatan laut (yang merupakan sebuah nilai plus untuk ASEAN) menjadikan India sebagai 'strategic asset' tersendiri untuk ASEAN. Yang menjadi perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada jangka waktu dan kebijakan yang dilakukan India. Acharya menjelaskan tentang kondisi politik-ekonomi India dimulai sejak merdeka hingga terbentuknya LEP. Sedangkan penulis akan mengkaji tentang kebijakan AEP yang merupakan kebijakan pembaharuan dari LEP berupa kerja

sama yang dilakukan oleh India dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang pada akhirnya dapat menggambarkan kepentingan yang mendasari India membentuk AEP di kawasan.

Studi pustaka ketiga adalah disertasi yang ditulis oleh Muhammad Fathullah pada tahun 2017 yang berjudul *Dari Look East ke Act East: Arti Penting Perubahan Kebijakan Luar Negeri India terhadap Negara-Negara di Asia Tenggara*.¹⁶ Artikel jurnal ini menjelaskan tentang seberapa penting perubahan kebijakan luar negeri India dari *Look East* menjadi *Act East* yang akan mencerminkan komitmen dan peranan India yang lebih aktif di kawasan dengan tujuan untuk membendung meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan terkhususnya di kawasan Asia Tenggara. Melalui perspektif *balance of threat*, kebijakan AEP terbentuk dari meningkatnya agresivitas Tiongkok di kawasan. India mempercayai bahwa Tiongkok merupakan aktor yang memiliki potensi untuk merusak keamanan. Dari sini, India memiliki tendensi dan alasan kuat untuk memperbaharui kebijakan luar negeri negaranya mengingat dinamika geopolitik yang kini telah berubah dan tidak sama dengan kondisi ketika LEP dibentuk.



Fathullah juga mendeskripsikan AEP melalui konsep *national self-image* yaitu bentuk reaksi terhadap pengalaman historis yang buruk sehingga memunculkan rasa takut akan kehilangan kehormatan, kekuatan, dan pengaruh suatu negara secara internasional. Hal ini sejalan dengan kondisi India yang sempat berpengaruh secara politik di awal masa kemerdekaan namun semakin lama

¹⁶ Fathullah, "Dari Look East ke Act East: Arti Penting Perubahan Kebijakan Luar Negeri India terhadap Negara-Negara di Asia Tenggara."

semakin menjauh dari kontestasi politik internasional sehingga India ingin kembali mendapatkan pengaruhnya di masa kontemporer.

Dari disertasi ini, penulis mendapat gambaran proses LEP menjadi AEP di kawasan Asia Tenggara melalui perspektif meningkatnya agresivitas Tiongkok di kawasan. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada jangkauan waktu dan objek kajian yang diteliti. Penulis memberikan gambaran dalam LEP hingga pada proses perubahan kebijakan tersebut menjadi AEP yang mana perubahan ini merupakan upaya India untuk tetap relevan di politik internasional. Sedangkan penulis mengkaji kepentingan India dalam AEP di kawasan yang juga menjelaskan bentuk kerja sama yang dilakukan di beberapa negara di kawasan seperti negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam), Indonesia, dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

Penjelasan tentang LEP secara historis dan proses perubahan LEP menjadi AEP memberikan kontribusi dalam penelitian yang dilakukan. Penulis kemudian melakukan studi pustaka pada analisis AEP secara khusus. Studi pustaka keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Meizaro Tifira Akbar dan Nuraeni yang berjudul *Analisis Kebijakan Luar Negeri India dalam Act East Policy*.¹⁷ Artikel jurnal ini menganalisis latar belakang munculnya kebijakan luar negeri AEP India melalui teori Kalevi J. Holsti berupa analisis faktor internal dan eksternal suatu negara membentuk kebijakan luar negerinya. Menurut Holsti, faktor internal yang mempengaruhi suatu negara merumuskan kebijakan luar negerinya adalah karena nilai, kebutuhan, tradisi birokratis yang dianut oleh suatu negara itu sendiri. Selain

¹⁷ Meizaro Tifira Akbar dan Nuraeni, "Analisis Kebijakan Luar Negeri India dalam Act East Policy," *Padjajaran Journal of International Relations* 5, no. 1 (2023): 36–52.

itu, ketidakstabilan domestik seperti jenis rezim apa yang berkuasa, besarnya populasi negara, serta tingkat pembangunan suatu negara juga turut menjadi faktor internal dari perumusan kebijakan luar negeri. Sedangkan faktor eksternal dalam perumusan kebijakan luar negeri adalah tujuan dan tindakan negara lain, tren dan struktur sistem global serta struktur kekuasaan dan pengaruh dalam sistem internasional.

Faktor eksternal terbentuknya AEP dipengaruhi oleh peristiwa di sistem internasional yaitu bangkitnya kekuatan dan agresivitas Tiongkok di kawasan serta munculnya strategi “Pivot to Asia” yang dilakukan AS. Faktor internal perumusan AEP dikarenakan faktor geografis berupa terbatasnya akses maritim India di kawasan Asia-Pasifik, ketidakstabilan domestik India, besarnya populasi, krisis politik, dan jenis rezim kekuasaan Perdana Menteri Narendra Modi yang berbeda. Dari faktor-faktor tersebut, penulis dapat merangkai bagaimana berakhirnya perumusan AEP. Perbedaan artikel jurnal dengan penelitian yang dilakukan adalah pada analisis AEP. Penulis memaparkan faktor perumusan AEP secara eksternal dan internal melalui perspektif Kaley J. Holsti sementara penulis menganalisis kepentingan India melalui AEP di kawasan Asia Tenggara melalui teori *balance of threat*.

Studi pustaka berikutnya adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Amitendu Palit pada tahun 2016 yang berjudul *India's Act East Policy and Implications for Southeast Asia*.¹⁸ Melalui artikel jurnal ini, Palit menjelaskan tentang bentuk implementasi strategi India melalui AEP di kawasan Asia Tenggara dengan

¹⁸ Palit, “India’s Act East Policy and Implications for Southeast Asia.”

menekankan pada dua hal yaitu jangkauan geografi (*geographic scope*) melalui perluasan jangkauan kerja sama dan pendalaman strategis (*strategic depth*) dengan menjadikan ASEAN sebagai “anchor of Act East Policy.” Dalam *geographic scope*, selain melaksanakan “Act East” ternyata Narendra Modi juga turut menjalankan “Link West” untuk menyeimbangkan dan memaksimalkan peranan India di sistem internasional. Maka dari itu, perubahan kebijakan LEP menjadi AEP menurut Perdana Menteri Narendra Modi merupakan strategi India untuk menempatkan India menjadi aktor regional yang menonjol. Sedangkan untuk *strategic depth*, India memutuskan untuk tidak hanya berfokus pada kerja sama ekonomi saja tetapi juga fokus pada perluasan keamanan maritim seperti Latihan Angkatan Laut bersama.

Artikel jurnal ini berkontribusi dalam penelitian berupa pemahaman bagaimana upaya India melaksanakan kebijakan AEP ini pasca dua tahun terbentuknya terkhususnya di kawasan Asia Tenggara. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada jangkauan waktu implementasi kebijakan karena terdapat beberapa pembaharuan di dalamnya. Ada beberapa pernyataan penulis di dalam artikel jurnal ini yang sudah tidak relevan atau berubah seiring dengan dinamika kontestasi politik di kawasan Asia Tenggara seperti pada salah satu kajian subbab Regional Economic Architecture (RCEP) tentang India yang masih melakukan negosiasi RCEP untuk implementasi AEP yang mana saat ini India telah menarik diri dari RCEP ini. nantinya pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya dalam penulisan ini.

Studi pustaka keenam adalah artikel yang ditulis oleh Dhruva Jaishankar pada tahun 2019 yang berjudul *Acting East: India in the Indo-Pacific*.¹⁹ Dalam artikel ini, Jaishankar menjelaskan tentang bagaimana sejarah India membuat kebijakan dan kerja sama luar negerinya yang dimulai sejak kemerdekaan hingga saat ini sehingga dapat menggambarkan peran India di kawasan. Jaishankar berpendapat bahwa kebangkitan Tiongkok menjadi faktor utama dari perubahan yang terjadi di India karena hadirnya kebangkitan Tiongkok menjadi sebuah ancaman bagi India di kawasan yang pada akhirnya membuat India membentuk LEP di tahun 1991 dan AEP di tahun 2014. Artikel ini menjawab pertanyaan yang kerap muncul dalam penulis sebelumnya tentang perbedaan dari AEP dengan LEP dalam tiga hal yaitu AEP bergerak pada tujuan ekonomi dan keamanan yang lebih luas, fokus jangkauan wilayah hingga ke Asia Tenggara sampai Asia Timur Laut dan keseluruhan Indo-Pasifik, dan kepentingan dan prioritas dalam mewujudkan strategi tersebut juga telah ditingkatkan.

Dari artikel ini juga, penulis melihat kajian AEP ini melalui perspektif jangkauan kawasan yang lebih luas yaitu kawasan Indo-Pasifik yang menggabungkan kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perspektif yang lebih luas ini membantu penulis melihat hubungan dan pengaruh AEP baik secara politik maupun keamanan karena meskipun AEP membidik Asia Tenggara sebagai sasaran utama tetapi India juga memperluas jangkauan kebijakan ini di luar kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Jaishankar berpendapat bahwa AEP kini memiliki empat elemen utama yaitu mengamankan Samudra Hindia,

¹⁹ Dhruva Jaishankar, *Acting East: India in the Indo-Pacific*, *Brookings Impact Series*, Impact Series (New Delhi, 2019), <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/10/Acting-East-India-in-the-INDO-PACIFIC-without-cutmark.pdf>.

menghubungkan Asia Tenggara, menguatkan *strategic partnership* dengan *balancing power* lainnya dalam hal ini adalah AS, Jepang, Australia, Perancis, Rusia, dan lainnya, serta mengelola perselisihan dengan Tiongkok. Oleh sebab itu, perbedaan artikel ini dengan penulisan yang dilakukan adalah pada jangkauan kawasan yang lebih luas yaitu Indo-Pasifik dengan Asia Tenggara.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis kepentingan yang hendak dicapai India melalui AEP di kawasan Asia Tenggara, penulis menggunakan kerangka konsep kepentingan nasional oleh Donald E. Nuechterlein. Melalui kepentingan nasional, sebuah kebijakan luar negeri dapat dianalisis pembentukannya dan intensitas implementasi kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri yang terbentuk.

1.7.1 Kepentingan Nasional

Pemikiran realisme dalam hubungan internasional menjadi sebuah dasar dari munculnya konsep kepentingan nasional (*national interest*). Dalam realisme, negara menjadi aktor utama (*unitary actor*) yang harus melakukan segala cara untuk bertahan hidup (*self-help*) di dalam sistem internasional yang anarki. Melalui upaya untuk bertahan hidup kemudian memunculkan sebuah kepentingan nasional yang hendak dicapai. Negara dituntut untuk mencapai kepentingan nasional ini demi menjaga keberadaan kedaulatan negara dalam sistem internasional yang anarki.²⁰ Kepentingan nasional ini kemudian mendorong sebuah negara untuk mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri yang dapat menjadi sebuah alat untuk mencapai kepentingan tersebut.

²⁰ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, Palgrave Macmillan, Third., 2005.

Menurut Hans Morgenthau, kepentingan nasional diartikan sebagai konsep *power* (kekuasaan). Konsep tersebut merupakan pertimbangan utama suatu negara dalam membentuk sebuah kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi tujuan negara dalam melakukan kegiatan politik internasional dan *power* menjadi sarana bagi negara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, kepentingan nasional suatu negara dapat dilihat melalui politik luar negerinya.²¹

Sedangkan menurut Kalev J. Holsti dalam bukunya *International Politics: A Framework for Analysis*, kepentingan nasional adalah sekumpulan kondisi dan tujuan kolektif yang diserahkan pemerintah kepada individu ataupun para pemangku kebijakan untuk menguatkan pengaruhnya di luar dan juga mengubah atau melanjutkan perilaku dari negara lain.²² Holsti menambahkan bahwa kepentingan nasional ini juga digunakan sebagai tujuan dari kegiatan politik luar negeri negara. Tujuan tersebut adalah berupa citra yang akan ditunjukkan ke negara lain.

Istilah dari kepentingan nasional telah digunakan oleh penstudi dan pemangku kebijakan sejak pendirian dari sebuah negara untuk mendeskripsikan aspirasi dan tujuan negara berdaulat di sistem internasional. Dalam literatur kajian hubungan internasional, istilah dari kepentingan nasional telah dituliskan oleh beberapa penstudi seperti Charles Beard, Hans Morgenthau, Joseph Frankel, dll. Tetapi, belum ada definisi yang disepakati bersama terkait kepentingan nasional ini

²¹ Hans J. Morgenthau, “‘Great Debate’: The National Interest of the United States,” *The American Political Science Review* 46, no. 4 (1952): 961–988, <https://www.jstor.org/stable/1952108?origin=JSTOR-pdf>.

²² Kalev J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, Edisi 5. (New Jersey: Prentice Hall, 1988).

oleh para penstudi dan cenderung menentukan pengertian tersendiri terkait konsep kepentingan nasional ini.²³

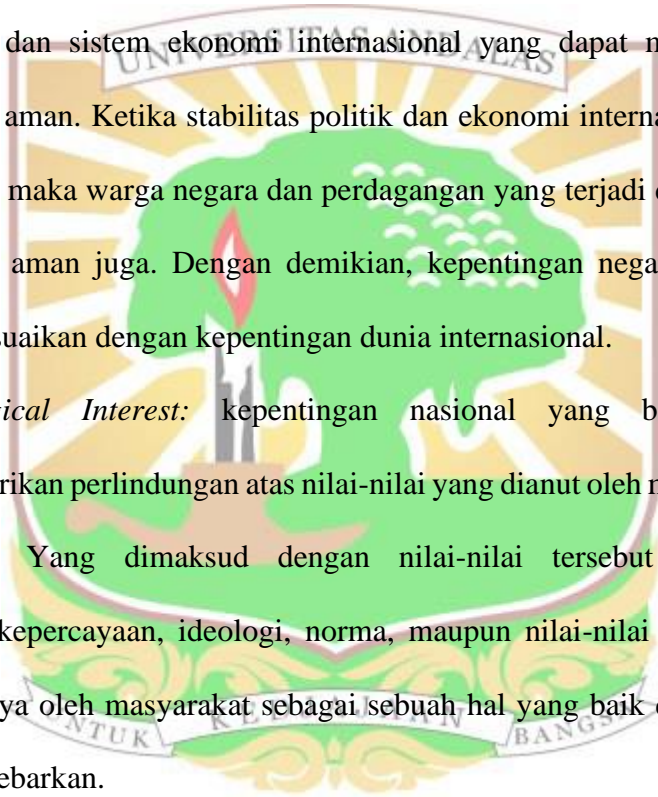
Pengertian dari kepentingan nasional secara sederhana menurut Nuechterlein adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari suatu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara berdaulat lainnya yang membentuk lingkungan eksternal. Perlu diketahui bahwa dalam kepentingan nasional itu menekankan pada kepentingan negara secara keseluruhan dan bukan kepentingan dari kelompok tertentu, birokrasi, ataupun partai politik. Nuechterlein kemudian membagi jenis kepentingan nasional suatu negara dalam empat kebutuhan utama yang nantinya membentuk sebuah kebijakan luar negeri.²⁴ Berikut adalah empat kepentingan nasional utama sebuah negara, yaitu:

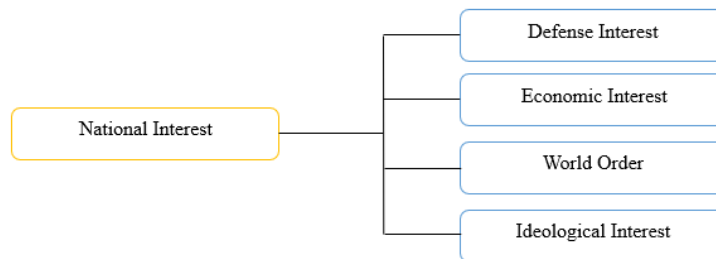
1. *Defence Interest*: kepentingan nasional berupa upaya sebuah negara untuk melindungi dirinya dan warga negaranya dari semua jenis ancaman yang ditujukan kepadanya. Bentuk ancaman dalam konteks ini adalah berupa ancaman fisik (*physical violence*) yang diakibatkan oleh negara lain. Dalam hal lainnya, ancaman yang tidak berasal dari negara tetapi terdapat campur tangan negara lain di baliknya masih dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman. Ancaman-ancaman yang dianggap mengganggu sebuah negara tersebut memerlukan keputusan atau tindakan dari negara untuk menghilangkan ancaman tersebut.

²³ Donald E. Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making," *British Journal of International Studies* 2, no. 3 (1976): 246–266.

²⁴ Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making," : 248.

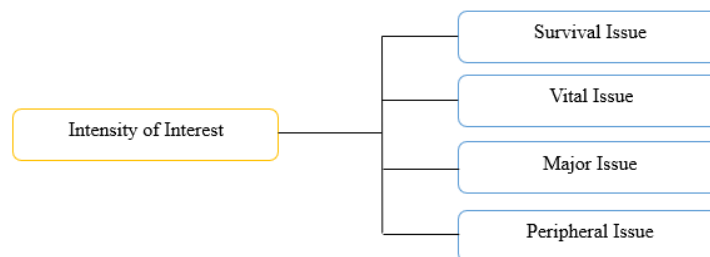
2. *Economic Interest*: kepentingan yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negara dalam hubungan dengan negara-negara lain. Kapabilitas ekonomi sebuah negara kerap menjadi dasar utama sebuah negara untuk membentuk sebuah kebijakan dan mencapai kepentingan nasionalnya. Semakin meningkat perekonomian sebuah negara, semakin maju dan kuat negara tersebut dalam sistem internasional.
3. *World Order Interest*: kepentingan nasional berupa pemeliharaan kondisi politik dan sistem ekonomi internasional yang dapat membuat negara merasa aman. Ketika stabilitas politik dan ekonomi internasional ini dapat terjaga, maka warga negara dan perdagangan yang terjadi dapat beroperasi dengan aman juga. Dengan demikian, kepentingan negara di sini dapat menyesuaikan dengan kepentingan dunia internasional.
4. *Ideological Interest*: kepentingan nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Yang dimaksud dengan nilai-nilai tersebut dapat berupa agama/kepercayaan, ideologi, norma, maupun nilai-nilai keluhuran yang dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah hal yang baik dan perlu dijaga dan disebarkan.





Gambar 1. 1 *National Interest* menurut Donald E. Nuechterlein
 Sumber: Donald E. Nuechterlein, “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making.”

Pembagian kepentingan nasional menjadi empat bagian utama digunakan sebagai *guideline* untuk para *decision-maker* melihat sebuah negara memilah kepentingan nasionalnya masing-masing. Nuechterlein kemudian juga menambahkan bahwa selain melihat kepentingan nasional berdasarkan empat bagian utama, perlu juga untuk melihat sejauh mana intensitas dari kepentingan tersebut. Maksud dari intensitas di sini adalah urutan prioritas seberapa penting suatu kepentingan nasional tersebut karena setiap komponen kepentingan nasional memiliki tingkat prioritas yang berbeda-beda.²⁵



Gambar 1. 2 *Intensity of Interest* menurut Donald E. Nuechterlein
 Sumber: Donald E. Nuechterlein, “National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making.”

²⁵ Nuechterlein, “National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making,”: 248.

Nuechterlein menyatakan bahwa pembagian tingkat intensitas atas empat kepentingan nasional utama suatu negara terdiri dari empat tingkat, yaitu:²⁶

1. *Survival issues*: kondisi di mana eksistensi dari sebuah negara berada dalam posisi terancam sehingga kepentingan dilakukan untuk bertahan hidup (*survive*). Nuechterlein menambahkan bahwa hanya kepentingan keamanan (*defence interest*) saja yang masuk dalam definisi *survival issue* ini.
2. *Vital issues*: kondisi di mana kerusakan serius akan dirasakan negara apabila suatu ancaman tidak segera disingkirkan atau diselesaikan. Cara untuk menyingkirkan ancaman tersebut adalah menggunakan pendekatan yang keras (*strong measures*) seperti menggunakan kekuatan militer sebagai tindakan balasan atas ancaman yang diberikan oleh negara lain ataupun sebagai tindakan preventif meluasnya provokasi. Perbedaan *vital issues* dengan *survival issue* adalah pada kesempatan untuk negara mencari bantuan dari sekutu ataupun bernegosiasi dengan negara yang memberikan ancaman terhadap solusi dari perselisihan yang terjadi. Dalam *vital issues* ini tidak hanya *defence interest*, tetapi *economic interest*, *world order*, dan di beberapa kondisi *ideological interest* juga masuk di dalamnya.
3. *Major issues*: kondisi di mana secara politik, ekonomi, dan ideologi sebuah negara mengalami dampak tidak baik dari *trend* dan fenomena sistem internasional yang mana memerlukan tindakan tegas dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut menjadi sebuah ancaman serius (*vital issues*). Hampir seluruh isu dalam hubungan internasional masuk ke dalam kategori isu ini yang mana akan diselesaikan melalui negosiasi diplomatis. Namun,

²⁶ Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making.": 250.

dalam praktiknya, seringkali yang termasuk dalam *major issues* adalah konflik-konflik yang terkait dengan isu ekonomi dan ideologi.

4. *Peripheral issues*: kondisi di mana negara tidak mengalami dampak secara langsung dari adanya fenomena internasional atau ancaman tetapi pihak swasta atau perusahaan yang beroperasi atau berada di luar negeri yang mengalami dampak yang signifikan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan seperti *multinational company* menghasilkan pendapat yang juga besar sehingga pajak yang diberikan kepada negara juga cukup berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan negara.

Tabel 1. 1 Kepentingan Nasional menurut Donald E. Nuechterlein

Negara: X	Isu: Y			
Dasar Kepentingan	Intensitas Kepentingan			
	<i>Survival</i>	<i>Vital</i>	<i>Major</i>	<i>Peripheral</i>
<i>Defence Interest</i>				
<i>Economic Interest</i>				
<i>World Order Interest</i>				
<i>Ideological Interest</i>				

Sumber: Donald E. Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making."

Dari penjelasan konsep kepentingan nasional menurut Nuechterlein ini, penulis melihat bahwa konsep tersebut memiliki relevansi terhadap topik penelitian yang diangkat penulis dalam melihat kepentingan India dalam AEP di kawasan Asia Tenggara. Pertama-tama penulis akan melihat bagaimana kepentingan nasional India dalam empat komponen utama kepentingan nasional yang telah diuraikan sebelumnya. Melalui pembagian ini, penulis dapat memahami AEP menjadi sebuah konsep kepentingan nasional India hingga pada akhirnya India

memilih kawasan Asia Tenggara sebagai fokus utama implementasi kebijakan. Dari pembagian empat komponen utama kepentingan nasional tersebut, penulis melihat intensitas yang dilakukan India sehingga terbentuk urutan prioritas yang dilakukan India sebagai upaya mencapai kepentingan nasionalnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan penulisan yang bersifat kualitatif. Metode penulisan kualitatif merupakan suatu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, berfokus pada proses-proses yang terjadi dan khususnya berusaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul.²⁷ Penulisan kualitatif merupakan penulisan yang lebih bergantung pada data-data linguistik dibandingkan data-data yang bersifat numerik, baik dalam bentuk tekstual ataupun lisan. Kemudian, jenis penulisan adalah deskriptif analitis yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian serta memberikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat. Deskripsi tersebut berupa apa kepentingan yang hendak India capai dibalik perubahan kebijakan AEP di kawasan Asia Tenggara.

1.8.2 Batas Penulisan

Agar mempermudah pemahaman atas penulisan ini diberikan batasan agar penelitian lebih fokus pada hal yang dijelaskan. Penulis membagi batasan penulisan menjadi dua hal, yaitu:

²⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. Vicki Knight et al., 4th ed., vol. 21 (California: SAGE Publications, 2014), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

- a. Batasan isu: penulisan ini difokuskan pada pengaruh kebijakan luar negeri *Act East Policy* India di kawasan Asia Tenggara.
- b. Batasan waktu: penulisan ini difokuskan pada periode tahun 2014 hingga 2023 yang mana tahun 2014 adalah awal dari terbentuknya *Act East Policy* dan tahun 2023 sebagai jangkauan terakhir kebijakan ini.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah objek perilaku yang akan dianalisis atau disebut juga dengan variable dependen. Unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan atau diamati yang disebut juga sebagai variabel independen. Sedangkan level analisis adalah hal yang menjadi landasan dalam keberlakuan suatu pengetahuan.²⁸ Dalam penulisan ini, kepentingan India melalui AEP menjadi unit analisis dan kawasan Asia Tenggara menjadi unit ekplanasi dalam penelitian ini. Kemudian, untuk tingkat analisis dalam penulisan ini berada pada tingkat sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam penulisan. Data sekunder adalah data-data informasi yang didapatkan dari luar seperti dari sumber publik ataupun dari penulisan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap subjek terkait. Jenis data ini bisa didapatkan dalam bentuk data yang sudah diolah atau dipublikasikan, dan dokumen publik maupun dokumen privat.²⁹ Dalam hal untuk mendapatkan data sekunder ini dilakukan

²⁸ Mohtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1 ed. (Jakarta: LP3ES, 1990).

²⁹ Uma Nath Baral, "Research Data' in Social Science Methods," *Journal of Political Science* 17 (2017): 82–104.

menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang membatasi pengambilan data pada tulisan yang sudah ada dan tidak menggunakan data lapangan.

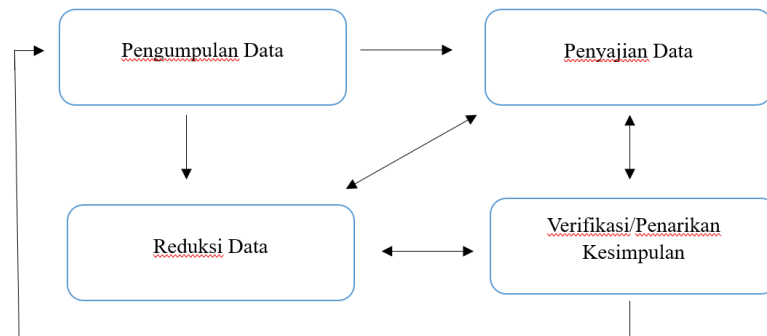
Pada penulisan ini, data utama yang menjadi sumber adalah data yang terdapat dalam situs-situs resmi yang menyediakan informasi berupa data-data. Seperti data tentang kepentingan India di kawasan Asia Tenggara melalui AEP ini penulis mengumpulkan data melalui laman resmi pemerintah India (*Ministry of External Affairs India*) dan laman resmi negara-negara di Asia Tenggara lainnya terkait kerja sama yang dilakukan. Data lainnya berupa artikel jurnal, buku, laporan, dan berita surat kabar berbasis internet juga penulis kumpulkan untuk kemudian dianalisis. Buku *India's Look East Policy* yang ditulis oleh Amitav Acharya menjadi dasar penulis untuk melihat bagaimana AEP kemudian dapat muncul sebagai perubahan dari LEP. Artikel jurnal lainnya seperti *India's Act East Policy and Implications in Southeast Asia* yang ditulis oleh Amitendu Palit menjadi salah satu data sekunder dalam melihat pembaharuan AEP di awal masa terbentuknya. Data-data sekunder yang dikumpulkan menggunakan *keyword* yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini yaitu AEP, kepentingan India, dan Asia Tenggara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.³⁰ Menurut Miles dan Hubberman, teknik analisis data terdiri atas tiga tahapan

³⁰ Lexy J. Maleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi 3. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.

yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).³¹



Gambar 1. 3 Proses analisis data penulisan kualitatif

Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook."

Dalam reduksi data akan melalui reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkrip tertulis. Sedangkan dalam penyajian data, yang dimaksud penyajian adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan untuk penulis menarik kesimpulan ataupun tindakan. Penyajian data nantinya terjadi penarikan hubungan data dengan kerangka konseptual yang digunakan. Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan tahap evaluasi dari analisis yang telah dilakukan dan hasil temuan yang didapatkan.

Dalam penulisan ini, reduksi data dilakukan melalui membagi data berdasarkan kategori dan kata kunci yang relevan seperti *Act East Policy*, *Look East*

³¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, ed. Rebecca Holland, *SAGE Publications*, Edisi 2. (London: SAGE Publications, 1994), <https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>.

Policy, kepentingan negara, kebijakan luar negeri, hubungan India dan Asia Tenggara, kerja sama bilateral, *special strategic partneship*, dan negara CLMV. Kemudian dalam penyajian data, penulis menghubungkan kondisi India dan kawasan Asia Tenggara yang kemudian dapat mempengaruhi India dalam membentuk AEP dan mencapai kepentingannya di kawasan. Kondisi India dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat dilihat melalui bentuk-bentuk tindakan India seperti melakukan kerja sama *special strategic partnership* di bidang ekonomi dan keamanan dalam AEP. Di tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, penulis melakukan verifikasi hasil temuan yang didapatkan dan menarik kesimpulan pada apa kepentingan yang hendak dicapai India melalui AEP di kawasan Asia Tenggara.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini terdapat latar belakang penulisan, rumusan masalah, pertanyaan penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Kebijakan Luar Negeri India dari *Look East Policy* ke *Act East Policy*

Bab ini secara lebih rinci menjelaskan tentang profil negara India serta bagaimana proses transformasi terbentuknya *Look East Policy* sebagai kebijakan luar negeri pertama India pasca Perang Dingin yang kemudian diperbaharui menjadi *Act East Policy*.

BAB III Implementasi *Act East Policy* di Kawasan Asia Tenggara

Bab ketiga menjelaskan tentang implementasi AEP selama delapan tahun berjalan. Implementasi dari kebijakan ini berupa kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti negara CLMV dengan fokus bidang ekonomi kemudian hubungan bilateral seperti dengan Indonesia dengan fokus di bidang pertahanan dan keamanan maritim.

BAB IV Kepentingan India Melalui *Act East Policy* di Kawasan Asia Tenggara

Dalam bab ini menjelaskan tentang kepentingan yang hendak dicapai oleh India dengan pembentukan dan implementasi dari AEP di kawasan Asia Tenggara. Kepentingan tersebut ditinjau melalui tindakan India dari segi ekonomi dan keamanan dengan analisis teori kepentingan nasional oleh Donald E. Nuechterlein.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penulisan yang telah dilakukan yang menjawab pertanyaan penulisan atas kepentingan India melalui *Act East Policy* di kawasan Asia Tenggara.

